

# **RENCANA KERJA 2025**

**Dinas Perumahan dan Kawasan  
Permukiman Kota Pangkalpinang**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat menyusun Rencana Kerja untuk periode tahun 2025. Rencana ini merupakan upaya kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan pengembangan infrastruktur perumahan dan Kawasan permukiman yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di sektor perumahan dan permukiman, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melakukan kajian mendalam dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait. Kami berkomitmen untuk mewujudkan visi pembangunan perumahan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi, sesuai dengan arah kebijakan nasional maupun lokal.

Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi panduan utama bagi seluruh jajaran Dinas Perumahan dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan penuh dedikasi serta profesionalisme. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik dari internal maupun eksternal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kami sadar sepenuhnya bahwa implementasi rencana ini akan menghadapi berbagai tantangan. Namun, dengan dukungan semua pihak terkait, kami yakin dapat mengatasi setiap hambatan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Akhir kata, kami berharap rencana ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, dan menjadi landasan yang kokoh dalam membangun masa depan perumahan yang lebih baik untuk semua.

Pangkalpinang, 16 Juli 2024

Kepala Dinas Perumahan dan  
Kawasan Permukiman

M.BELLY JAWARI, ST. M.Si  
PEMBINA TK.I / IV b  
NIP 197907252005011008

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	5
1.3. Maksud dan Tujuan .....	10
1.4. Sistematika Penyusunan .....	11
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>13</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	29
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>33</b>
3.1. Telaahan Terhadap Program Nasional.....	33
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja .....	40
3.3. Program dan Kegiatan .....	41
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....</b>	<b>53</b>
4.1. Kaidah Pelaksana Rencana Kerja .....	53
4.2. Rencana Tindak Lanjut.....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>53</b>
5.1. Uraian Penutup.....	55

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. LATAR BELAKANG**

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Bagian Ketiga Pasal 12 Ayat 1 huruf d, menyatakan bahwa Bidang Perumahan dan Kawasan Perumahan adalah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Pangkalpinang harus segera membentuk Kelembagaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Kota Pangkalpinang merupakan salah satu unsur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kota Pangkalpinang yang mempunyai Tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Bagian Kedua Pasal 2 menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- c. mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan terutama bagi MBR dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi tahun ketiga RPJMD paruh ke empat dari RPJP-D Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 dan hasil evaluasi penyelenggaraan RPJMD tahun 2024-2026.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

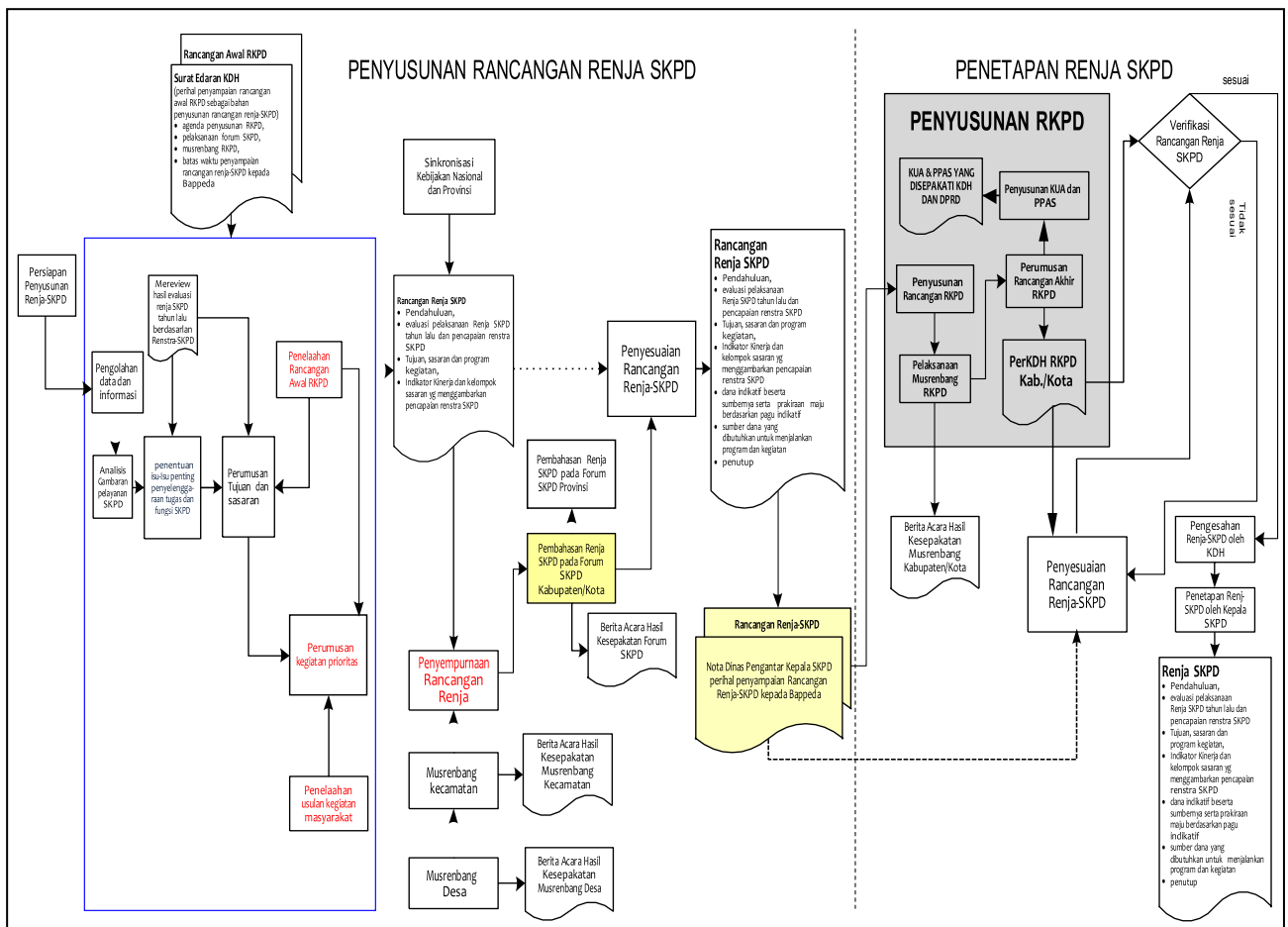
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah.

Penyusunan Laporan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkin), merupakan tindak lanjut atas ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara substansi merepresentasikan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang khususnya pada bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Selain itu juga sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

Gambar 1.1  
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



## **I.2. Landasan Hukum**

Perencanaan Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang merupakan salah satu dokumen perencanaan yang tidak dapat terlepas dari Subtansi dokumen-dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunannya, Pembangunan perumahan dan permukiman dilandasi peraturan perundangan yang bersumber dari adanya amanat UUD 1945 Bab X Hak Asasi Manusia : " Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan ".

Amanat UUD 1945 tersebut secara hierarki dijabarkan dalam Undang-Undang yang antara lain meliputi :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat dan Kab. Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5252);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
  19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

- 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
  24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  25. Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau Di Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan;
  26. Peraturan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 Tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintahan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
  28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

- Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07 seri E Nomor 03);
  30. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E);
  31. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);
  32. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
  33. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
  34. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
  35. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 54);
  36. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07 seri E Nomor 03);
  37. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

- Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E);
38. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Kota Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 6);
  39. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
  40. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 56).
  41. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144).
  42. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148).

### **I.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah selain untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2025, juga untuk merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat

di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera

Sebagai tindaklanjut dari uraian diatas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Kota Pangkalpinang telah menyusun target yang akan dicapai oleh bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam periode tiga tahun ke depan meliputi:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, dan pengendalian bidang perumahan dan kawasan permukiman demi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan;
2. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif;
3. Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah Kota Bekasi untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai;
4. Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi untuk pencapaian visi dan misi organisasi;

#### **I.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang Tahun 2025, meliputi :

##### **BAB I        PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **BAB II        HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**

Menjelaskan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2023, analisis kinerja pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD, Arah Kebijakan, serta Program dan Kegiatan.

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tentang Program dan Kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang.

### BAB V PENUTUP

Menjelaskan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**

#### **II.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Kota Pangkalpinang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Kota Pangkalpinang merupakan salah satu unsur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kota Pangkalpinang yang mempunyai Tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana dan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 2.1. Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang sampai dengan triwulan 2 tahun 2023, berikut ini :

**TRIWULAN II**  
**Evaluasi Terhadap Hasil Renja**  
**Perangkat Daerah Dinas Perumahan Dan Permukiman**  
**Kota Pangkalpinang Tahun 2024**

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
1	-	010401	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah ( Dengan Satuan:Nilai)	74,860	5.826.390.503	10	709.834.983	50	1.684.902.048	0	0	0	0	50	2.394.737.031	66,791	41,102	SEKRETARIAT
				Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	80		10		50		0	0	0	50			62,500		SEKRETARIAT
2		010401201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	18.516.000	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	40	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3		010401201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	17.020.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
4		010401201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1.496.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
5		010401202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	3.788.018.845	17,100	616.654.631	50	1.244.173.107	0	0	0	0	50	1.860.827.738	50	49,124	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
6		010401202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	35	3.708.764.357	0	604.518.783	0	1.219.969.335	0	0	0	0	0	1.824.488.118	0	49,194	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
					6		7		8		9		10		11		12			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7		010401202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	2.266.050	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100	0	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
8		010401202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	18	76.988.438	1	12.135.848	0	24.203.772	0	0	0	0	0	1	36.339.620	5,556	47,201	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
9		010401203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah yang ditata dan diinventarisir (Dengan Satuan:%)	100	116.886.784	15	15.514.464	50	31.271.696	0	0	0	0	50	46.786.160	50	40,027	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN	
10		010401203006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	116.886.784	1	15.514.464	1	31.271.696	0	0	0	0	1	46.786.160	100	40,027	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN	
11		010401204	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase kontribusi daerah terhadap PAD (Dengan Satuan:%)	0,185	3.198.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
12		010401204005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	12	1.599.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
13		010401204007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	12	1.599.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
14		010401205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	20	169.043.392	5	3.878.616	5	87.742.924	0	0	0	0	5	91.621.540	25	54,200	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
15		010401205002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	1	87.500.000	0	0	0	79.925.000	0	0	0	0	0	79.925.000	0	91,343	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
16		010401205003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	12	51.543.392	1	3.878.616	0	7.817.924	0	0	0	0	1	11.696.540	8,333	22,693	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					6		7		8		9		10		11		12		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
17		010401205009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan ( Dengan Satuan:Orang)	5	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
18		010401206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	500.990.726	7	33.622.496	50	140.581.418	0	0	0	0	50	174.203.914	50	34,772	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
19		010401206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan ( Dengan Satuan:Paket)	1	10.850.700	0	0	0	3.620.700	0	0	0	0	0	3.620.700	0	33,368	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
20		010401206003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	8.500.000	0	0	0	1.850.000	0	0	0	0	0	1.850.000	0	21,765	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
21		010401206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	85.187.050	0	0	0	620.000	0	0	0	0	0	620.000	0	0,728	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
22		010401206005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan ( Dengan Satuan:Paket)	2	35.718.000	0	0	0	14.012.000	0	0	0	0	0	14.012.000	0	39,230	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
23		010401206006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	12	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
24		010401206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	150.000.000	0	0	0	58.044.974	0	0	0	0	0	58.044.974	0	38,697	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
25		010401206010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ( Dengan Satuan:Dokumen)	12	27.271.696	0	4.378.616	0	8.567.924	0	0	0	0	0	12.946.540	0	47,472	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
26		010401206011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD ( Dengan Satuan:Dokumen)	12	180.463.280	1	29.243.880	0	53.865.820	0	0	0	0	1	83.109.700	8,333	46,054	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
					6		7		8		9		10		11		12			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
27		010401208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	350.103.056	12	40.164.776	50	116.558.359	0	0	0	0	50	156.723.135	50	44,765	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
28		010401208001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	48.543.392	1	7.757.232	0	15.635.848	0	0	0	0	1	23.393.080	8,333	48,190	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
29		010401208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	80.000.000	0	0	0	26.105.395	0	0	0	0	0	26.105.395	0	32,632	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
30		010401208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	221.559.664	0	32.407.544	0	74.817.116	0	0	0	0	0	107.224.660	0	48,395	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
31		010401209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	879.633.000	5	0	50	64.574.544	0	0	0	0	50	64.574.544	50	7,341	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
32		010401209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	40.450.000	0	0	0	11.823.298	0	0	0	0	0	11.823.298	0	29,229	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
33		010401209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	14	193.380.000	0	0	0	30.904.246	0	0	0	0	0	30.904.246	0	15,981	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
34		010401209006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	20	44.975.000	0	0	0	21.847.000	0	0	0	0	0	21.847.000	0	48,576	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
35		010401209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	600.828.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)</b>																		<b>64,646</b>	<b>41,102</b>	
<b>PREDIKAT KINERJA</b>																		<b>R</b>	<b>SR</b>	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
					6		7		8		9		10		11		12			13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
36	-	010402	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana (Dengan Satuan:%)</b>	100	1.367.302.953	15	194.150.248	50	266.749.060	0	0	0	0	50	460.899.308	50	33,709	<b>BIDANG PERUMAHAN</b>	
37		010402201	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban bencana atau Relokasi yang terlaksana (Dengan Satuan:%)	100	203.624.480	9	17.393.080	50	70.448.800	0	0	0	0	50	87.841.880	50	43,139	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH	
38		010402201002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	27.430.696	0	3.378.616	0	7.067.924	0	0	0	0	0	10.446.540	0	38,083	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH	
39		010402201003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dengan Satuan:Dokumen)	1	929.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH	
40		010402201004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	28.997.696	0	3.378.616	1	7.067.924	0	0	0	0	1	10.446.540	100	36,025	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH	
41		010402201006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dengan Satuan:Dokumen)	1	40.195.696	0	3.378.616	0	7.312.924	0	0	0	0	0	10.691.540	0	26,599	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH	
42		010402201009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			106.071.392		7.257.232		49.000.028		0		0		56.257.260		53,037	Dinas Perumahan dan Permukiman	
43		010402202	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah (Dengan Satuan:%)	100	88.024.050	9	4.378.616	50	8.567.924	0	0	0	0	50	12.946.540	50	14,708	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					6		7		8		9		10		11		12		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
44		010402202001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	20	19.997.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
45		010402202004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Dengan Satuan:Orang)	20	6.026.704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
46		010402202009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Dengan Satuan:Orang)	50	61.999.746	0	4.378.616	0	8.567.924	0	0	0	0	0	12.946.540	0	20.882	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
47		010402203	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	100	25.000.000	5	0	50	0	0	0	0	0	50	0	50	0	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
48		010402203001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Dengan Satuan:Unit Rumah)	2	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
49		010402205	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dengan Satuan:%)	100	866.360.285	20	157.659.104	50	140.017.918	0	0	0	0	50	297.677.022	50	34,359	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
50		010402205002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dengan Satuan:Dokumen)	12	866.360.285	1	157.659.104	1	140.017.918	0	0	0	0	1	297.677.022	8,333	34,359	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
51		010402206	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase layanan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	100	174.794.238	9	14.719.448	50	46.514.418	0	0	0	0	50	61.233.866	50	35,032	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					6		7		8		9		10		11		12		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
52		010402206001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dengan Satuan:Dokumen)	1	89.999.842	1	11.340.832	1	25.813.248	0	0	0	0	1	37.154.080	100	41,282	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
53		010402206003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Dengan Satuan:Laporan)	1	75.294.496	1	3.378.616	1	20.701.170	0	0	0	0	1	24.079.786	100	31,981	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
54		010402206004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum (Dengan Satuan:Laporan)	1	9.499.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
55		010402207	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (Dengan Satuan:%)	100	9.499.900	5	0	50	1.200.000	0	0	0	0	50	1.200.000	50	12,632	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
56		010402207001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) (Dengan Satuan:Laporan)	1	9.499.900	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	0	12,632	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)</b>																<b>50,000</b>	<b>33,709</b>		
<b>PREDIKAT KINERJA</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>		
57	-	010403	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (Dengan Satuan:%)</b>	<b>86</b>	<b>2.318.762.968</b>	<b>98</b>	<b>76.520.872</b>	<b>98</b>	<b>1.111.123.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>1.187.644.604</b>	<b>100</b>	<b>51,219</b>	<b>BIDANG PERMUKIMAN</b>
58		010403201	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Izin Pengembangan Kawasan Permukiman yang terlaksana (Dengan Satuan:%)	100	72.996.392	11	7.757.232	45	20.494.556	0	0	0	0	45	28.251.788	45	38,703	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
					6		7		8		9		10		11		12			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
59		010403201001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik (Dengan Satuan:Dokumen)	1	72.996.392	1	7.757.232	1	20.494.556	0	0	0	0	1	28.251.788	100	38,703	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	
60		010403202	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Dengan Satuan:%)	60	269.936.380	7	17.893.080	40	61.609.836	0	0	0	0	40	79.502.916	66,667	29,452	SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
61		010403202001	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dengan Satuan:Dokumen)	1	105.171.492	0	6.757.232	1	26.382.848	0	0	0	0	1	33.140.080	100	31,511	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	
62		010403202003	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh (Dengan Satuan:Kelompok Masyarakat)	1	89.765.192	0	7.757.232	1	15.635.848	0	0	0	0	1	23.393.080	100	26,060	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	
63		010403202004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Dengan Satuan:Laporan)	1	24.999.696	0	3.378.616	1	7.067.924	0	0	0	0	1	10.446.540	100	41,787	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	
64		010403202007	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Dengan Satuan:Dokumen)	1	25.000.000	0	0	1	12.523.216	0	0	0	0	1	12.523.216	100	50,093	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	
65		010403202009	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah (Dengan Satuan:Rumah Tangga)	50	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab									
					6		7		8		9		10		11		12											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
66		010403203	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha (Dengan Satuan:%)	100	1.975.830.196	10	50.870.560	54	1.029.019.340	0	0	0	0	54	1.079.889.900	54	54,655	SUB KOORDINATOR PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH									
67		010403203007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)	1	43.880.000	0	3.378.616	1	7.067.924	0	0	0	0	1	10.446.540	100	23,807	SUB KOORDINATOR PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH									
68		010403203009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh			1.931.950.196		47.491.944		1.021.951.416		0		0		1.069.443.360		55,356	Dinas Perumahan dan Permukiman									
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)</b>																								<b>100,000</b>	<b>51,219</b>			
<b>PREDIKAT KINERJA</b>																									<b>ST</b>	<b>R</b>		
69	-	<b>010404</b>	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>Persentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di kota (Dengan Satuan:%)</b>	<b>97</b>	<b>638.003.272</b>	<b>20</b>	<b>11.885.848</b>	<b>45</b>	<b>88.269.508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>100.155.356</b>	<b>46,392</b>	<b>15,698</b>	<b>BIDANG PERMUKIMAN</b>									
70		010404201	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh (Dengan Satuan:%)	0	638.003.272	1	11.885.848	40	88.269.508	0	0	0	0	40	100.155.356	100	15,698	SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH									
71		010404201001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Dengan Satuan:Unit Rumah)	16	638.003.272	0	11.885.848	0	88.269.508	0	0	0	0	0	100.155.356	0	15,698	SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH									
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)</b>																									<b>46,392</b>	<b>15,698</b>		
<b>PREDIKAT KINERJA</b>																										<b>SR</b>	<b>SR</b>	



No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab															
							I		II		III		IV																					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13															
78	-	010406	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pelayanan legalisasi bidang perumahan dan kawasan permukiman (Dengan Satuan:%)	100	4.700.000	8	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0	BIDANG PERUMAHAN														
79		010406201	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase Layanan Sertifikasi dan Registrasi yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	100	4.700.000	5	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0	SUB KOORDINATOR PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERUMAHAN														
80		010406201001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Dengan Satuan:Laporan)	1	4.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN														
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)</b>																																		
<b>PREDIKAT KINERJA</b>																																		
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)</b>																																		
<b>PREDIKAT KINERJA</b>																																		
<b>Faktor pendorong keberhasilan kinerja:</b>				<b>- Kesiapan Tim pelaksana</b>																														
<b>Faktor penghambat pencapaian kinerja:</b>				<b>- Adanya kendala dilapangan</b>																														
<b>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:</b>				<b>--</b>																														
<b>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:</b>				<b>--</b>																														

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	

Dievaluasi  
Kota Pangkalpinang, tanggal 12-07-2024  
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
KOTA PANGKALPINANG

M. BELLY JAWARI, ST, M.Si.  
NIP.197907252005011008

## II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Kota Pangkalpinang terbentuk pada tanggal 03 Januari 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.

Dalam mencapai target kinerjanya, dibutuhkan peran serta dan dukungan dari berbagai pihak, dan juga dibutuhkan dukungan dana serta ide kreatif, hal ini tidak bisa hanya dikerjakan dan ditumpukan kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Kasi yang membidangnya, inilah yang menjadi kendala diinternal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Kota Pangkalpinang.

Secara garis besar permasalahan pokok kinerja pelayanan bidang perumahan dan permukiman meliputi; rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau, serta menurunnya kualitas permukiman dengan masih besarnya luasan kawasan kumuh diperkotaan.

Adapun permasalahan pokok air bersih meliputi;  
rendahnya peningkatan pelayanan air minum di perkotaan dan perdesaan, serta rendahnya kualitas manajemen pengelolaan air minum. Sedangkan permasalahan pokok air limbah adalah masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat (sistim sewerage), serta belum memadainya pelayanan sanitasi yang dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah.

Permasalahan pokok persampahan meliputi;  
masih rendahnya tingkat capaian pelayanan sampah di perkotaan, serta masih lemahnya manajemen dan operasional teknis pengelolaan sampah.

Sedangkan masih luasnya daerah genangan serta banyak terjadinya banjir di kawasan perkotaan merupakan permasalahan pokok dalam penanganan drainase.

Dalam hal penataan bangunan terdapat permasalahan mendasar yaitu masih rendahnya penegakan aturan keselamatan bangunan, serta masih diperlukannya pembinaan teknis dalam pembangunan gedung.

Adapun dalam bidang pengembangan perkotaan, permasalahan pokok meliputi;

perkembangan perkotaan yang tidak seimbang antara kota-kota metropolitan/besar dengan kota-kota menengah dan kecil, serta memburuknya kualitas fisik kawasan perkotaan, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat perkotaan karena keterbatasan pelayanan kebutuhan dasar perkotaan yang banyak dipicu oleh adanya tingkat urbanisasi yang tinggi.

Mengingat permasalahan pokok dalam bidang perumahan dan permukiman tersebut yang secara prinsip menyangkut hajat hidup masyarakat luas, khususnya menunjang terpenuhinya kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan hunian dan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan layak, maka pada pelaksanaan pembangunannya disamping harus dilandasi oleh hasil evaluasi pencapaian sasaran dan permasalahan juga perlu didukung dengan suatu perencanaan program yang konseptual dan realistis, serta mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan formal baik tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

Dengan tersusunnya perencanaan strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang diharapkan lebih lanjut dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk dapat memberikan komitmen dan orientasi target dan sasaran pada masa depan pada masing-masing bidang kegiatan. Menurut Lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014, tentang

Pemerintahan Daerah Huruf D, Sub Urusan Bidang Perumahan dan Permukiman memiliki 4 (empat) Urusan yaitu :

1. Perumahan

Pembagian Urusan untuk Perumahan, Pemerintah Kabupaten/ Kota memiliki kewenangan dalam hal :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- c. Fasilitasi Site Plan pembangunan dan pengembangan perumahan; dan
- d. Fasilitasi Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).

2. Permukiman

Pembagian Urusan untuk Permukiman, Pemerintah Kabupaten/ Kota memiliki kewenangan dalam hal :

- a. Pengkajian dan Pengawasan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.

3. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Pembagian Urusan untuk Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Pemerintah Kabupaten/ Kota memiliki kewenangan dalam hal Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota

4. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Pembagian Urusan untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam hal Penyelenggaraan PSU perumahan.

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang adalah sesuai tabel berikut:

**Tabel 2.3**

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD  
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang  
Tahun 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)	Unit OPD Penanggung Jawab
		K	Rp	Rp	Rp	Rp	
1	3	7		12	13	14 = 6 + 12	16
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5,826,390,503	2,394,737,031	41.02%	2,394,737,031	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					<b>41.02.00%</b>		
<b>Predikat Kinerja</b>					<b>S</b>		
2	Program Pengembangan Perumahan		1,367,302,953	460,899,308	33.70%	103,589,832	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>					<b>33.70%</b>		
<b>Predikat Kinerja</b>					<b>R</b>		
3	Program Kawasan Permukiman		2,318,762,968	1,187,644,604	51.21%	50,915,576	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>					<b>51.21%</b>		
<b>Predikat Kinerja</b>					<b>S</b>		
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh		638,003,272	100,155,356	72.65%	22,961,004	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>					<b>72.65%</b>		
<b>Predikat Kinerja</b>					<b>T</b>		
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		1,011,651,964	735,044,444	10.31%	48,281,976	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>					<b>10.31%</b>		
<b>Predikat Kinerja</b>					<b>R</b>		

6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		4,700,000	0	0.00%	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>					<b>30%</b>		
<b>Predikat Kinerja</b>					<b>R</b>		
	<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>	11,166,811,660	4,878,480,743		4,878,480,743		
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 6)</b>					<b>58.16%</b>		
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 6)</b>					<b>S</b>		

### II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam menopang pembangunan berkelanjutan maka perlu didukung beberapa langkah-langkah strategis yang diestimasi akan berpengaruh dalam pembangunan daerah ini, untuk itu diperlukan adanya identifikasi sekaligus tindakan analisis. Faktor strategis yang berpengaruh terhadap arah kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu 2024-2026 dapat dianalisis melalui lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut:

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Jumlah Kekurangan Rumah (Backlog) dan rendahnya angka pemenuhan rumah terutama bagi MBR;
2. Rendahnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang belum memadai.

#### **1.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mengalami perubahan dikarenakan adanya penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga program yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Perumahan
3. Program Kawasan Permukiman
4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kmuh
5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
6. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

#### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun perguruan tinggi yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang di tingkatan kelurahan, kecamatan maupun Kabupaten/Kota (bila sudah dilakukan).

Kebijakan dan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan

program-program pembangunan, maupun bersifat eksternal, yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, adalah sebagai berikut :

- a. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni yang dilengkapi sarpras PSU, dan pengentasan Kawasan kumuh, terkendala perilaku atau pola pikir beberapa masyarakat yang belum sepenuhnya memahami proses penganggaran dan pembangunan program pemerintah;
- b. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan;
- c. Terbatasnya pengembangan Prasarana dan Sarana Umum ( PSU ) dan Infrastruktur dasar perumahan seperti jalan lingkungan/jalan setapak, jembatan gantung/plat, drainase, Ruang Terbuka Publik dsb;

### **2.5.1. Strategi**

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

- A. Peningkatan pemenuhan kebutuhan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat untuk memberikan jaminan kepastian bermukim bagi masyarakat melalui :
  - 1) Pemberian bantuan pembangunan rumah baru layak huni;
  - 2) Rekonstruksi dan rehabilitasi bangunan, prasarana dan sarana di lingkungan perumahan yang terkena bencana alam dan korban relokasi program pemerintah;

- 3) Penyusunan Pedoman, standar dan petunjuk teknis pelaksanaan;
- 4) fasilitasi termasuk monev pra-sertifikasi dan pasca-sertifikasi rumah bersubsidi serta realisasi pembangunan dan pemanfaatannya;
- 5) Pemuktahiran data perumahan;
- 6) pengembangan RUSUNAWA.

B. Meningkatkan kenyamanan dan kesehatan lingkungan perumahan melalui:

- 1) Pembangunan PSU Lingkungan Perumahan;
- 2) Pemeliharaan PSU Lingkungan Perumahan;
- 3) Peningkatan peran masyarakat dalam penyediaan PSU Lingkungan Perumahan;
- 4) Pemuktahiran data kawasan lingkungan permukiman kumuh

### **2.5.2. Arah Kebijakan**

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan Pemenuhan layanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan/atau relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota
2. Meningkatkan penataan dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat
3. Meningkatkan pelaksanaan penataan dan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi.
4. Meningkatkan pelaksanaan penanganan Kawasan permukiman kumuh
5. Meningkatkan Pelaksanaan Prasarana, Sasaran dan Utilitas Umum (PSU)
6. Meningkatkan Layanan Sertifikasi dan Registrasi Pelaksanaan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **III.1. Telaahan Terhadap Program Nasional**

Mengacu pada Renstra Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 pada point 3.3.4 tentang ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN BIDANG PUPR YANG MENDUKUNG “Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau”, dijelaskan bahwa :

Tujuan ketiga pada Renstra Kementerian PUPR adalah terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sedangkan untuk Renstra Perangkat Daerah Provinsi Bangka Belitung yang mengacu pada Visinya yaitu “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”, dan Misi I yaitu Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah.

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional bidang permukiman dan perumahan pada dimensi pembangunan manusia dan masyarakat dan pembangunan kewilayahan dan pemerataan dalam RPJMN tahun 2020-2024 serta percepatan proyek strategis pembangunan nasional yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat dengan

menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus, maka Kementerian PUPR juga mengarahkan kebijakan pembangunan bidang permukiman dan perumahan fokus pada masyarakat berpenghasilan rendah dan kawasan/wilayah prioritas nasional dimulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta pengentasan daerah tertinggal, perbatasan, serta pulau-pulau terluar, serta program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional, melalui ;

- a) Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar permukiman yang layak huni: cakupan pelayanan akses air minum, penanganan permukiman kumuh perkotaan, dan cakupan pelayanan akses sanitasi;
- b) Peningkatan penyediaan perumahan yang layak huni dan berkelanjutan: penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni dan peningkatan rumah yang layak huni; serta
- c) Peningkatan dukungan pembiayaan rumah yang layak huni dan berkelanjutan: penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni, dan peningkatan aksesibilitas terhadap bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga MBR.

## **A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN BIDANG PERMUKIMAN**

Pembinaan dan Pengembangan Permukiman diarahkan pada pencapaian sasaran pembangunan nasional dan SDGs serta mendukung penyelenggaraan agenda prioritas nasional pada dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pembangunan sektor unggulan, dimensi pemerataan dan pembangunan kewilayahan. Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian PUPR dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman menggunakan tiga strategi pendekatan

yaitu membangun sistem, memfasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten, serta memberdayakan masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat.

Dalam membangun sistem, Kementerian PUPR memberikan dukungan pembangunan infrastruktur dengan memprioritaskan sistem infrastruktur Provinsi/Kabupaten/Kota pada kawasan yang memiliki fungsi strategis secara nasional. Dalam hal fasilitasi Pemerintah Daerah, bentuk dukungan yang diberikan adalah fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalam penguatan kelembagaan, keuangan, termasuk pembinaan teknis terhadap tugas dekonsentrasi dan pembantuan. Untuk pemberdayaan masyarakat, bentuk dukungan yang diberikan adalah pembangunan infrastruktur permukiman melalui program-program pemberdayaan masyarakat.

#### **A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN**

Arah kebijakan pembangunan bidang PUPR melalui pengembangan perumahan dan pengembangan pembiayaan perumahan dilaksanakan untuk mewujudkan agenda prioritas pembangunan nasional dimensi manusia dan masyarakat, dimensi pembangunan sektor unggulan, juga dimensi pemerataan dan pembangunan kewilayahan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan fisik terbangun (jaringan infrastruktur), potensi pengembangan dan daya tampung wilayah, jumlah dan kepadatan penduduk, serta kejadian bencana. Maka dari itu, arah Kebijakan pengembangan perumahan difokuskan pada prioritas pembangunan nasional:

- a) kawasan industri/KEK,
- b) Kawasan pariwisata,
- c) pengembangan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana,

- d) Kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis Teknologi Komunikasi,
- e) keterkaitan desa dan kota
- f) kawasan perbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga (187 (seratus delapan puluh tujuh) lokasi prioritas, termasuk didalamnya 92 (sembilan puluh dua) pulau terluar),
- g) daerah tertinggal, dan
- h) pengurangan beban penduduk miskin dan rentan (melalui bansos rumah swadaya pada masyarakat nelayan dan pekerja industri perikanan dll).

Selain itu arah Kebijakan pengembangan perumahan juga difokuskan pada program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional yang sesuai dengan rumusan tujuan Kementerian PUPR, yaitu peningkatan kontribusi pengembangan perumahan bagi MBR dengan memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan.

## **B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN**

Arah kebijakan pembangunan bidang PUPR melalui pembiayaan perumahan berdasarkan dukungan yang dilaksanakan untuk mewujudkan agenda prioritas pembangunan nasional dimensi manusia dan masyarakat, serta dimensi pemerataan dan pembangunan kewilayahan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, maka arah Kebijakan pembiayaan perumahan, difokuskan pada prioritas pembangunan nasional, yang utamanya untuk kawasan/wilayah:

- a) kawasan industri/KEK;
- b) Kawasan pariwisata;
- c) pengembangan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana;

- d) Kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis Teknologi Komunikasi;
- e) keterkaitan desa dan kota;
- f) kawasan perbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga 187 (seratus delapan puluh tujuh) lokasi prioritas, termasuk didalamnya 92 (sembilan puluh dua) pulau terluar);
- g) daerah tertinggal; dan
- h) dukungan pengurangan beban penduduk miskin dan rentan, serta program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional sesuai dengan rumusan tujuan Kementerian PUPR adalah memperluas akses terhadap fasilitas pembiayaan tempat tinggal yang layak bagi MBR yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan serta pendekatan demand management dengan prioritas nasional.

Visi Kementerian PU dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024 adalah:  
"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan".

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian PU dan Perumahan Rakyat adalah :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan;

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, maka tujuan pembangunan jangka menengah yang ingin dicapai yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam;
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing;
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional; dan
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian dalam dalam periode 2020-2024, adalah meningkatnya kehandalan infrastruktur PUPR dalam mewujudkan:

1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air;
2. Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional;
3. Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman dan Terjangkau;

4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional; dan
5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknik Lainnya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mendukung pencapaian sasaran ke-3 : Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian PU dan Perumahan Rakyat tercantum pada tabel berikut.

**Tabel 3.3**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**  
**Kota Pangkalpinang**  
**berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan**  
**Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau.	Kurangnya Kesadaran dan peran serta masyarakat untuk Bersama-sama berusaha keluar dari zona kumuh	Pemberian izin membangun diatas tanah masyarakat	Dilaksanakannya Musrenbang dari tingkatan Kelurahan sampai Kota dan Sosialisasi
		Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap mekanisme pengadaan barang jasa hibah kepada masyarakat oleh pemerintah	Masih ada warga yang meminta RLH berupa PB padahal dalam rap dan anggarannya adalah PK	Adanya penganggaran berkelanjutan dan sosialisasi pra pembangunan

### III.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.

Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang sesuai dengan tugas pokoknya melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dan asas otonomi dan tugas pembantuan, meliputi : perencanaan, bangunan gedung, perumahan, PSU dan permukiman, pengendalian bangunan

### **III.2.1. Tujuan**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang sebagai berikut: “Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang nyaman, produktif dan berkelanjutan”

### **III.2.2. Sasaran**

Sasaran pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman didasari oleh target capaian pelayanan yang ideal sesuai dengan referensi maupun regulasi yang relevan, yaitu dengan perhitungan yang berbasis MDGs dan SPM. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik dan terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut: “Meningkatnya Penyediaan Akses (dan/ pemenuhan kebutuhan) Hunian Dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman Dan Terjangkau”

### **III.3. Program dan Kegiatan**

Kegiatan yang dilakukan merupakan bagian dari program pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang, sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas maupun kegiatan belanja langsung yang telah disetujui oleh lembaga legislatif yang bertujuan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Pangkalpinang. Penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang meliputi :

1. Program Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang;
2. Hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota;
3. Penajaman program melalui forum SKPD;
4. Penyelarasan program-program yang selanjutnya dilakukan penelaahan

sebagai program prioritas.

Dari uraian diatas dan jika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

**Program Pengembangan Perumahan**

1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
4. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
5. Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
6. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)

#### **Program Kawasan Permukiman**

1. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
2. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
3. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

#### **Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**

1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

#### **Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum**

1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

#### **Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kulaifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

1. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pemabngunan dan Keuangan Daerah, maka Program dan Kegiatan beserta pendanaannya yang diajukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang pada perubahan renja Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PANGKAL PINANG  
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
											NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>						<b>9.038.841.926,00</b>							<b>2.903.000.000,00</b>				
	<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>9.038.841.926,00</b>							<b>2.903.000.000,00</b>				
	<b>1.04</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>						<b>9.038.841.926,00</b>							<b>2.903.000.000,00</b>				
1.	<b>1.04.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Nilai Sakip Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah</i>	<b>75,06 Nilai 90 Nilai</b>				<b>74,96 Nilai 85 Nilai</b>						<b>75,06 Nilai 90 Nilai</b>	<b>2.903.000.000,00</b>				
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase penyampaian dokumen perencanaan, panganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu</i>	100 %				100 %		0,00				100 %	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>					1 Dokumen		0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>					1 Laporan		0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP</i>	100 %				100 %		3.965.841.926,00				-	Pembangu nan Pemer intahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah		100 %	2.903.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>					35 Orang/bulan		3.965.841.926,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemer intahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			2.900.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				18 Laporan	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase barang milik perangkat daerah yang ditata dan diinventarisir</i>	100 %			100 %	30.000.000,00			-	-	-	100 %	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	30.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	<i>Persentase kontribusi daerah terhadap PAD</i>	0,185 %			0,180 %	0,00			-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	0,182 %	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah</i>				12 Laporan	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>				12 Dokumen	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN</i>	-100 %			-37,5 %	150.000.000,00			-	Pembangu nan Peme ri ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	-100 %	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	100.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Peme ri ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				12 Dokumen	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Peme ri ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				35 Orang	50.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Peme ri ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah</i>	100 %			100 %	643.774.000,00			-	Pembangu nan Peme ri ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	100 %	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	19.993.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	264.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	9.795.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	100.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	49.986.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Peme ri ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	200.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Peme ri ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				12 Dokumen	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Peme ri ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				12 Dokumen	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Peme ri ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %			100 %	1.061.753.000,00			-	Pembangu nan Peme ri ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	100 %	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemer ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	80.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemer ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	981.753.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemer ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik</i>	100 %			100 %	280.980.000,00			-	Pembangu nan Pemer ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	100 %	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	40.250.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemer ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				14 Unit	219.880.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				25 Unit	20.850.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	<b>1.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b><i>Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kab/kota</i></b>	<b>100 %</b>			<b>100 %</b>	<b>1.108.144.000,00</b>						<b>100 %</b>	<b>0,00</b>	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban bencana atau Relokasi yang terlaksana</i>	100 %			100 %	137.636.000,00			-	Pembangunan Wilayah Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	-	100 %	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan														
			<i>Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan</i>				1 Dokumen	3.259.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Wilayah Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus</i>				1 Dokumen	43.459.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Wilayah Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	30.459.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Wilayah Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	60.459.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<i>Persentase pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah</i>	100 %			100 %	29.152.000,00			-	Pembangunan Wilayah Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	-	100 %	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana														
			<i>Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>				20 Orang	2.734.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Wilayah Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator														
			<i>Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih</i>				20 Orang	4.509.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Wilayah Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan</i>				0 Orang	21.909.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	<i>Persentase Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</i>	100 %			100 %	790.000.000,00			-	-	-	100 %	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus														
			<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</i>				1 Dokumen	790.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Ketapang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	<i>Persentase layanan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang dilaksanakan</i>	100 %			100 %	141.897.000,00			-	-	-	100 %	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik														
			<i>Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik</i>				0 Dokumen	64.354.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</i>				0 Laporan	62.409.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum</i>				0 Laporan	15.134.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	<i>Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung</i>	100 %			100 %	9.459.000,00			-	-	-	100 %	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)</i>				0 Laporan	9.459.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	1.04.03	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau</b>	93.00 %			93.00 %	475.042.000,00						93.00 %	0,00	
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Izin Pengembangan Kawasan Permukiman yang terlaksana	100 %			100 %	49.975.000,00			-	-	-	100 %	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				1 Laporan	49.975.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100 %			80 %	246.817.000,00			-	-	-	100 %	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				1 Dokumen	73.100.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh														
			Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina				1 Kelompok Masyarakat	53.127.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh														
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	120.590.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha	100 %			60 %	178.250.000,00			-	-	-	80 %	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh														
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	178.250.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	1.04.04	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>Persentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di kota</b>	98 %			98 %	641.605.000,00						98 %	0,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh	2 %			2 %	641.605.000,00			-	-	-	2 %	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki</i>				2 Unit Rumah	641.605.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	1.04.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Persentase Perumahan dan Permukiman yang dilengkapi PSU</b>	98.00 %			98.00 %	652.243.000,00						98.00 %	0,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	<i>Persentase Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>	100 %			100 %	652.243.000,00			-	-	-	100 %	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan</i>				0 Dokumen	59.284.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian														
			<i>Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian</i>				0 Lokasi	450.541.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan</i>				0 Laporan	42.459.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang</i>				0 Laporan	99.959.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6.	1.04.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase pelayanan legalisasi bidang perumahan dan kawasan permukiman</b>	100 %			100 %	29.459.000,00						100 %	0,00	
	1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	<i>Persentase Layanan Sertifikasi dan Registrasi yang dilaksanakan</i>	100 %			100 %	29.459.000,00			-	-	-	100 %	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil</i>				0 Laporan	29.459.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	<b>J U M L A H</b>								<b>9.038.841.926,00</b>						<b>2.903.000.000,00</b>	

## **BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

### **IV.1. Kaidah Pelaksana Rencana Kerja (Renja)**

Kaidah pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1. Sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun
2. Sebagai dasar Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD setiap tahun
3. Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja SKPD dalam 1 (satu) tahun

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan hasil rumusan perencanaan yang di mulai dari tingkat Kelurahan hingga tingkat Kota melalui Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan (MUSRENBANG) Tahun 2024. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan. Proses penjangkaran aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja anggota legislatif atau reses.

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan dasar yang dilayani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah pembangunan dan rehab rumah tidak layak huni, pembangunan dan rehab jalan setapak/ jalan lingkungan, pembangunan dan rehab drainase, pembangunan talud, plat duiker, pembangunan dan pemeliharaan taman, sehingga dalam setiap kesempatan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan selalu menyangkut atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberi usulan atau aspirasi atas kebutuhan di daerahnya melalui kebijakan-kebijakan dari para

pemangku kepentingan yang nantinya harus dialokasikan dalam rencana kerja SKPD untuk tahun anggaran yang akan datang bahkan dalam tahun anggaran berjalan.

## **IV.2. Rencana Tindak Lanjut**

Dengan mengoptimalkan pemanfaatan yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu mengikuti dinamika zaman dan tantangan untuk mewujudkan penataan Kota Pangkalpinang yang berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi harus disampaikan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan yang meliputi detail/rinci Perumahan Layak Huni, Kawasan Permukiman Tanpa Kumuh, Penyediaan Sarana dan Prasarana, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang menguasai teknologi informasi serta penetapan kelembagaan dan koordinasi yang lebih efektif diantara instansi guna mendukung perencanaan dan penentuan kebijakan pembiayaan serta untuk menentukan arah kebijakan dan strategi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terintegrasi dan strategis, serta berkelanjutan.

## **BAB. V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Uraian Penutup**

Rencana Kerja merupakan dokumen yang berisi program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Dinas dalam kurun waktu satu tahun. Maksud penyusunan Rencana Kerja adalah menyediakan dokumen yang berisi rencana kegiatan untuk memberi gambaran tentang kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai pelaksanaan terhadap rencana strategis Dinas dan sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah agar kegiatan dapat berjalan secara baik dan terarah sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai rencana strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu penyusunan Rencana Kerja diperlukan agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi keuangan, hasil dan juga manfaatnya bagi masyarakat.

Selain dengan melakukan inventarisasi/pendataan berbagai data dan informasi yang relevan dalam rangka menunjang kelayakan berbagai program kerja dan kegiatan yang direncanakan, Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang juga merupakan implementasi dan regulasi serta kerangka kebijakan yang disusun untuk 1 (satu) tahun untuk rencana dinas.

Dari Uraian yang kami sajikan diatas, saat ini kami menyajikan Renja Tahun 2025 berdasarkan program-program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengelola Keuangan Daerah.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) ini, dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan dinas dalam rangka mendukung tujuan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang berdasarkan prinsip efisiensi dan efektif menuju terwujudnya visi dan misi kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.